

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

Hukum Pengadaan Barang dan Jasa



CAHAYA ATMA PUSTAKA

Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

Oleh:

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

Hak Cipta © 2019, pada penulis

Hak publikasi pada Penerbit Cahaya Atma Pustaka

Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan ke- 05 04 03 02 01

Tahun 23 22 21 20 19

Cahaya Atma Pustaka

Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

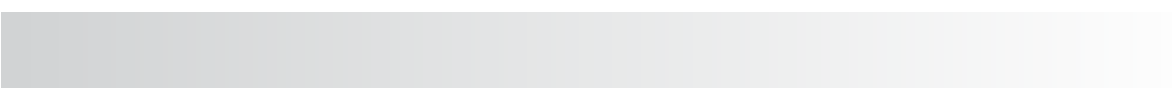
Jalan Moses Gatotkaca 28, Yogyakarta

Telp. (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525

E-mail: cahyaatma@gmail.com

ISBN: 978-602-7821-90-3

Hukum Pengadaan Barang dan Jasa



Kata Pengantar

Penulisan buku “Hukum Pengadaan Barang dan Jasa” ini pertama-tama didasarkan atas keinginan untuk mengisi ranah akademis maupun praktis terhadap adanya kebutuhan buku mengenai pengadaan barang dan jasa yang merupakan salah satu fase dari siklus pengelolaan barang milik negara/daerah (manajemen aset). Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan terkait dengan pelaksanaan fungsi tersebut dibutuhkan adanya barang maupun jasa yang digunakan untuk melaksanakan fungsi pelayanan pemerintah. Di sisi lain, keluarnya uang negara/daerah dari APBN/D sebagian besar memang melalui pintu keluar pengadaan barang dan jasa baik berdasarkan swakelola maupun melalui penyedia. Hal itu disebabkan pelaksanaan program maupun kegiatan pemerintah yang direncanakan dalam sistem perencanaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah melalui mekanisme pengadaan barang/jasa tersebut.

Penulisan buku ini selain dilaksanakan dengan menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari materi perkuliahan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan juga didasarkan atas sejumlah materi kursus seputar pengadaan barang dan jasa yang diikuti penulis dalam rangka menggali sumber-sumber materi yang relatif lengkap guna penulisan buku ini. Semoga buku ini bisa melengkapi khasanah keilmuan yang berkaitan dengan pengembangan sistem hukum pengadaan barang dan jasa pada khususnya maupun Hukum Administrasi Negara pada umumnya.

Yogyakarta, Juli 2019

Penulis

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
 Bab I	
Dasar-Dasar Pengadaan Barang dan Jasa	1
1. Pengertian dan Kedudukan Pengadaan Barang dan Jasa	3
2. Prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa	10
 Bab II	
Organisasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	15
1. Organisasi Pengelola	17
2. Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya dan Perpres No. 16 Tahun 2018.....	28
 Bab III	
Sistem Pengadaan Barang dan Jasa	49
1. Pengadaan Barang dan Jasa Sebagai Bagian dari Siklus Pengelolaan Keuangan Negara	51
2. Cara Pengadaan Barang dan Jasa.....	61
 Bab IV	
Proses Pengadaan Barang dan Jasa.....	71
1. Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Swakelola	73
2. Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia.....	104

Bab V**Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan****Metode Pemilihan Penyedia 131**

1. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dalam Hukum Administrasi dan Hukum Perdata 133
2. Titik Kritis Pengadaan Barang dan Jasa 161

Bab VI**Sistem Seleksi/Tender dalam****Pengadaan Barang /Jasa 175**

1. Arti Penting Seleksi 177
2. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 200
3. Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi 201
4. Metode Evaluasi Penawaran untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 202
5. Metode Evaluasi Penawaran untuk Jasa Konsultansi 204
6. Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 206
7. Pengadaan khusus 215

Bab VII**Tindak Lanjut Hasil Pengadaan Barang dan Jasa****dalam Siklus Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 225**

1. Tujuan dari Pengadaan Barang dan Jasa dalam Siklus Pengelolaan BMN/D 227
2. Tindak Lanjut 234

Bab VIII**Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum****(BLU) 239**

1. Karakteristik Badan Layanan Umum (BLU) 241
2. Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Layanan Umum (BLU) 252

Bab IX

Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	265
1. Karakteristik Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	267
2. Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	273

Bab X

Sanksi-Sanksi dalam Pengadaan Barang dan Jasa	285
1. Tipologi Sanksi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa.....	287
2. Sanksi Daftar Hitam	295

Bab XI

Pengawasan Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa	301
1. Pengertian Pengawasan	303
2. Pengawasan Internal-Fungsional oleh BPKP	306
3. Pengawasan Eksternal Oleh BPK	329

Bab XII

Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa	351
1. Karakteristik Penyelesaian Sengketa	353
2. Penyelesaian Sengketa Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	357

Daftar Pustaka.....	367
----------------------------	------------

Biodata Penulis	373
------------------------------	------------

Matriks Perbedaan Antara Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	375
---	------------

